

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Eko Supriyadi, Bambang, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2016, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Munsyarief, 2013, *Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, CV Ombak, Yogyakarta.
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Santoso, Urip, 2005, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- Sarjita, 2005, *Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah (Keppress No. 34 Tahun 2003)*, Tugu Jogja, Yogyakarta.
- Sembiring, Julius, 2016, *Tanah Negara Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suharsono dan Ana Retnoningsih, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Utomo, Tri Widodo Wahyu, 2002, *Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Navila, Yogyakarta

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wibawanti, Erna Sri dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5339.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di DIY. Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1956 Nomor 3.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UUPA di Propinsi DIY. Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri D Nomor 34 Tahun 1984.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35.

Rijksblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918.

3. Jurnal /Tesis

Antoro, Kus Sri, “Analisis Kritis Substansi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bidang Pertanahan”, *Bhumi*, Vol.1, No. 1, Mei, 2015.

Faradita, Nafiatul, “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, FIS UNY, 2017.

Hasim, Rangga Alfiandri, “Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Hukum tanah Nasional”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9, No. 2, Agustus, 2016.

Huda, Ni'matul, “Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum*, Vol.7, No. 3, April, 2000.

Kusumoharyono, Umar, “Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta Setelah Berlakunya UU No. 5/1960”, *Yustisia*, Edisi No. 2, Mei-Agustus, 2006.

Santi, Athanasia Dian, “Konstruksi Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diatas Tanah Kasultanan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Analisa Surat Kepala BPN No.

570.342493 tanggal 21 Oktober 2003)”, *Tesis*, Prodi M.Kn Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009.

Suriangka, Andi, “Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah”, *Al-Risalah*, Vol.13, No. 1, Mei 2013.

Sugiyarto, Hapsari Shinta, “Pelaksanaan Pemberian Hak Pakai Diatas Tanah Kasultanan Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Nasional”, *Tesis*, Prodi M.Kn Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2015.

4. Internet

Sultan HB X: Tak Ada Tanah Negara di Yogyakarta
<https://nasional.tempo.co/read/700934/sultan-hb-x-tak-ada-tanah-negara-di-yogya/full&view=ok>, diakses tanggal 24 Mei 2019.